

Audio Berita 6 menit

Oleh Fransiskus Wisnu Wardhana Dhany
29 Mar 2025 15:09 WIB · Metro

Sekali dihapus, seribu kali mural bakal digambar lagi. Semakin banyak pembungkaman, kian lantang mural menvuarakan

[Menu](#)[Cari](#)**KOMPAS**
AMANEH RUMAH SAKSI[Berlangganan](#)[Masuk](#)

di depan Universitas Trisakti, Jakarta Barat, ditimpa cat hitam. Namun, samar-samar masih terbaca kritik terhadap pemerintah dan DPR yang ngotot merevisi Undang-Undang TNI.

Lukisan di dinding ini dibuat 23 mahasiswa Fakultas Seni Rupa dan Desain Universitas Trisakti pada 21 Maret 2025. Peralatannya milik sendiri dan hasil patungan dari kantong masing-masing sebesar Rp 1 juta.

Dalam salah satu unggahan di Instagram, komunitas seni mahasiswa Desa Rupa bahkan menyebut, "Nah, kali ini main tebak-tebakan yuk, tahan berapa lama? Ingat, sekecil apa pun perlawanan! Kami menular, mengakar, dan menjalar ke mana-mana."

Baca Juga**Kau Hapus, Mural Pun Kubuat Kembali**

Tebak-tebakan mereka terjawab sepekan kemudian. Tepatnya, Jumat (28/3/2025), mural itu ditimpa cat hitam oleh sejumlah pasukan oranye, petugas Penanganan Prasaranan dan Sarana Umum Pemprov DKI Jakarta.

"Sudah kami prediksi karena kegiatan bikin mural ini sudah dari zaman angkatan dulu. Ada mural terkait 12 Mei (Trag. Coba Gratis di Aplikasi Palestina, putusan Mahkamah Konstitusi, dan lainnya" ujar Ketua DEM

Daftar untuk akses lebih banyak artikel mendalam dan komprehensif.



Ia dan teman-teman tidak mempermasalahkan penghapusan mural tersebut. Sebab, lumrah mural berisi kritik dihapus. Sebaliknya, mural dukungan atau gambar biasa tidak dihapus.

Penghapusan justru menunjukkan pesan mereka sudah sampai kepada pemerintah dan DPR. Hal itu kian memacu semangat untuk kembali menyuarakan keresahan masyarakat.

Iklan - Gulir ke Bawah untuk melanjutkan

Iklan

"Ini inisiatif kami. Mungkin dari fakultas tidak turun menyuarakan di Senayan, tapi selalu ada cara lain untuk menyuarakan isu yang meresahkan masyarakat," ujar Dosi.

Baca Juga

Ketika Tembok-tembok Kota Berbicara

Keresahan masyarakat ini yang disorot Pengajar Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Jakarta Ubedilah Badrun. Mural sebagai wujud ekspresi kritik sosial atau situasi sosial sesuai konteksnya tidak bisa dihakimi.

Sebaliknya, karya kreatif itu hanya bisa dicermati dan direspons dengan perspektif karya kreatif sebagai hak. Jadi, aneh jika mural yang bernuansa kritik sosial atau penggambaran realitas direspons dengan pendekatan represi (penghapusan).

"Sebaiknya para penghapus mural bersikap lebih bijak berbasis analisis konteks agar tidak bersikap reaktif dan represif," tutur Ubedilah.

Penghapus mural, lanjutnya, jangan memosisikan diri sebagai penguasa. Sementara masyarakat atau pembuat mural diposisikan sebagai obyek yang dikuasai. Akibatnya, pandangan itu membuat mural dianggap memusuhi negara.

Coba Gratis di Aplikasi

Daftar untuk akses lebih banyak artikel mendalam dan komprehensif.





KOMPAS/FRANSISKUS WISNU WARDHANA DANY

Sisa mural tentang penolakan terhadap revisi UU TNI oleh mahasiswa Universitas Trisakti di Flyover Grogol, Jakarta Barat, Sabtu (29/3/2025).

Gema keresahan

Penghapusan mural bukan hal baru di Tanah Air. Namun, sejarah mencatat, penghapusan justru membuat keresahan masyarakat terus bergema.

Tulisan "Tuhan Aku Lapar" di tembok Jalan Aryawasangkara, Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Banten, semakin dikenal setelah dihapus pada 2021.

Iklan - Gulir ke Bawah untuk melanjutkan

Iklan

Hal serupa terjadi pada mural "Hapus Korupsi, Boekan Muralnya" di Jalan Inpres, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang, serta "404: Not Found" yang sempat menghiasi dinding terowongan inspeksi Tol Kunciran-Bandara Soekarno-Hatta di Batucei

Coba Gratis di Aplikasi

Daftar untuk akses lebih banyak artikel mendalam dan komprehensif.



"Ibarat kritik lisan yang disampaikan banyak orang kepada mereka yang dikritik. Pada dasarnya, setiap seniman mural sudah memahami ketidakabadian karyanya," ujar Mikke pada Sabtu siang.

Baca Juga

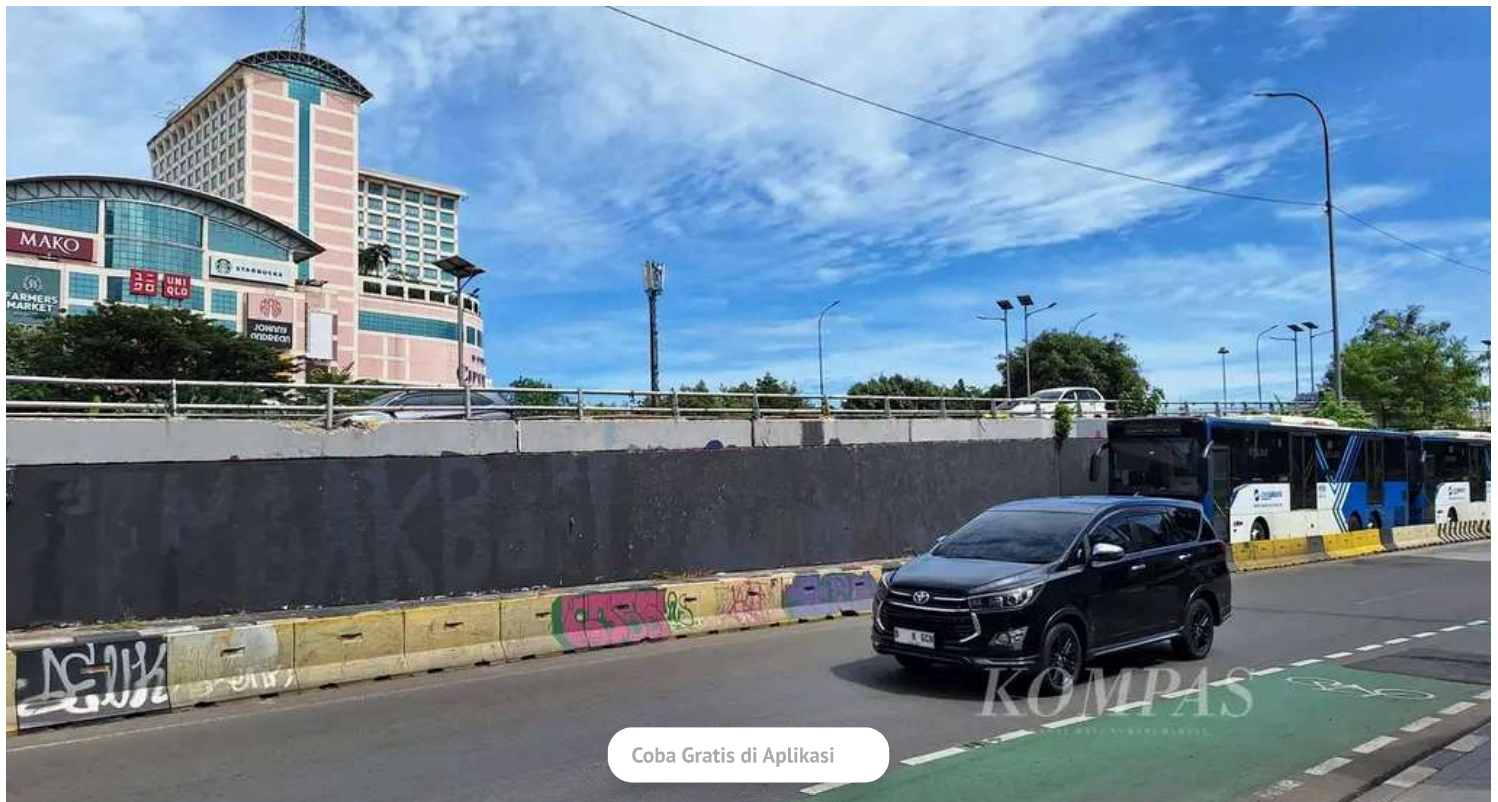
Suara dari Dinding-dinding Kota

Namun, ada hal yang lebih penting dari keberadaan mural itu sendiri. Bagaimana pesannya dapat bertahan lama.

Menurut Mikke, mural membutuhkan media lain, seperti foto, video, atau dokumentasi. Tujuannya, merekam jejak mural agar tetap abadi.

"Dalam media rekam inilah apa yang disuarakan akan terasa efeknya. Setidaknya memberi kesadaran kepada publik yang lebih luas," ucap kurator seni ini.

Selain foto dan video, mural yang bermunculan juga dapat menjadi bahan diskusi lebih luas, baik melalui pemberitaan media maupun kajian ilmiah. Jurnalis, misalnya, dapat berperan sebagai tandem seniman mural dalam menyikapi suatu keresahan masyarakat, seperti penolakan revisi Undang-Undang TNI.



Daftar untuk akses lebih banyak artikel mendalam dan komprehensif.



Mural dalam kontestasi publik berfungsi sebagai media publikasi sekaligus panggung bagi peristiwa yang tidak disukai masyarakat. Mural menciptakan ruang sekunder di luar panggung utama tempat suatu peristiwa terjadi.

Iklan - Gulir ke Bawah untuk melanjutkan

Iklan

Sebagai contoh, panggung utama revisi UU TNI adalah gedung DPR. Sementara panggung sekundernya berada di tempat aksi massa berunjuk rasa dan mural-mural yang bertebaran di berbagai sudut kota.

"Semakin banyak ruang sekunder (mural), semakin kuat pula gema dan tensi peristiwa yang dikritik," tutur Mikke.

Situasi ini, katanya, mengingatkan pada Proklamasi 17 Agustus 1945. Panggung utamanya berada di Rumah Pegangsaan Timur Nomor 56. Namun, ruang pendukungnya muncul dalam bentuk grafiti di kereta api dan poster "Boeng Ajo Boeng" yang ditempel di berbagai tempat serta diarak keliling kota.

Seperti proklamasi yang tak hanya bergema di satu tempat, mural juga terus menyuarakan keresahan meskipun ditimpa ulang berulang kali.

Versi cetak artikel ini terbit

Coba Gratis di Aplikasi

2 April 2025 di halaman 12

dengan judul "Ruang Sekunder Mural yang Tak Luntur"

Daftar untuk akses lebih banyak artikel mendalam dan komprehensif.

